

## PENGARUH KETIDAKMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

**Helma\***

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi

[helmahelam097@gmail.com](mailto:helmahelam097@gmail.com)

**Rini Elvira**

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi

[rinielvira99@gmail.com](mailto:rinielvira99@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

**Received:**

October 10, 2023

**Revision:**

December 26, 2023

**Published:**

December 31, 2023

**Abstract**

*Despite the common assumption that income inequality is influenced by regional development, our findings suggest that this is not always the case. This study examines the effect of regional development on income inequality. The purpose of this study is to prove how variable X (uneven development among regions) impacts variable Y (income distribution inequality), this is determined through comparative causal research using a quantitative approach and secondary data. The data collection technique used was literature study. Data prerequisite test and hypothesis testing were used as data analysis techniques. Hypothesis testing was conducted using simple linear regression analysis, t-test, and coefficient of determination. The results showed the existence of inequality. The effect of regional development on income distribution inequality is partially positive, as indicated by the t-test value and the coefficient of determination. The t-value of 2.182 and a significant p-value of 0.031 indicate this relationship. While the results of the R-Squared test show that the inter-regional development inequality variable has an influence of 0.045 or 4.5% on the income distribution inequality variable with variables outside the study contributing 95.5% such as investment in capital-intensive projects, a deteriorating exchange rate, import substitution industrial policy, destroyed folk craft industries, inflation, low social mobility and population growth.*

**Keywords:** *Inequality of Development Among Regions, Inequality of Income Distribution, Income Distribution.*

**Abstrak**

Penelitian ini berdasarkan pergerakan ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang sebahagian besar tidak diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan dimana fenomena bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan bagaimana variabel X (ketidakmerataan pembangunan antar daerah) berdampak pada variabel Y (ketimpangan distribusi pendapatan), menggunakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif, data sekunder dan untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, uji prasyarat data dan uji hipotesis digunakan sebagai teknis analisis data, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmerataan pembangunan antar daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 2.182 dan signifikan sebesar 0.031. Sedangkan hasil uji R-Squared menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah memiliki pengaruh sebesar 0,045 atau 4,5% terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan dengan variabel-variabel di luar penelitian menyumbang 95,5% seperti investasi pada proyek padat modal, nilai tukar yang memburuk, kebijakan industri substitusi impor, industri-industri kerajinan rakyat yang hancur, Inflasi, mobilitas sosial yang rendahnya dan pertumbuhan penduduk.

**Kata Kunci:** Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Distribusi Pendapatan.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar taraf hidup masyarakat meningkat, (Arsyad 2014) pembangunan mencakup berbagai aspek yaitu perubahan dalam perilaku rakyat, struktur sosial, kelembagaan nasional, perubahan pada pertumbuhan ekonomi, pengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan, (Huda 2017) terdapat trade off pada pembangunan ekonomi diantara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pemerataan pendapatan, bila pembangunan ekonomi berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi pesat pada waktu yang singkat tetapi distribusi pendapatan tidak dapat dicapai secara optimal dalam waktu singkat, namun pertumbuhan ekonomi akan dihasilkan pada waktu yg cukup lama, jika pemerataan pendapatan menjadi focus pembangunan ekonomi. (Yuliadi 2020)

Distribusi pendapatan yang adil merupakan ukuran yang penting, jika sebagian penduduk berpenghasilan tinggi dan sebagian lainnya berpenghasilan rendah, maka keberhasilan pembangunan tidak sempurna, (Purba 2021) Ketimpangan distribusi pendapatan ialah disparitas pendapatan diantara penduduk atau disparitas pendapatan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Koefisien gini atau indeks gini ialah alat ukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan total, dengan angka mulai dari nol sampai satu. (Sulistyono 2021) Distribusi pendapatan bukanlah perkara praktis sebab dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang bahkan mampu mengakibatkan kegagalan pemerataan, (Huda 2017) Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang menurut Adelman dan Morris salah satunya adalah Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. (Saripudin 2021)

Ketidakmerataan pembangunan antar daerah ialah keadaan yang terjadi dimana terdapat disparitas kondisi daerah antara daerah maju dan daerah tertinggal, disparitas ini disebabkan daerah tertinggal tidak dapat memanfaatkan potensi wilayahnya secara maksimal dan kurangnya sumber daya yang tersedia bagi daerah tersebut sehingga menimbulkan kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal, (Hamrullah 2021) dan dikarenakan daerah dengan perkembangan ekonomi yang pesat memiliki kesempatan kerja lebih banyak daripada daerah dengan stagnasi ekonomi, (Tambuna 2018) lebih jelasnya penyebab ketidakmerataan pembangunan antar daerah adalah focus kegiatan ekonomi wilayah, alokasi dana pembangunan, sumber daya alam yang berbeda, perpindahan barang dan jasa kurang lancar, dan kondisi demografis perbedaan.

Dampak ketidakmerataan dalam pembangunan menimbulkan adanya jurung disparitas antar daerah dan kemudian berdampak pada masalah politik dan sosial, hal ini jelas merugikan pembangunan, sebagai dampak yang ditimbulkan dapat berupa disparitas antara kelompok miskin dan kaya dimana disparitas ini akan semakin timpang sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. (Azis 2019). Untuk mengetahui ketidakmerataan pembangunan antar daerah dapat menggunakan indeks ketimpangan Williamson. (Sjafrizal 2017)

Konsep pembangunan yang lebih menekankan dan mengoptimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi daripada kesenjangan pendapatan dalam masyarakat sudah seharusnya dikaji kembali dikarenakan konsep pembangunan ekonomi kemasyarakatan seharusnya diterapkan dalam perencanaan, strategi, serta program kerja pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada penyeimbangan distribusi pendapatan. (Makapedua, Karambuti, and Langi 2023) Distribusi pendapatan merujuk pada pemerataan di suatu daerah agar tingkat disparitas antar masyarakat menurun, distribusi pendapatan pula ditujukan agar setiap masyarakat negara menerima fasilitas dan penghidupan yang layak. (Hidayati, n.d.)

Berdasarkan data yang didapat dari BPS ditemukan suatu fenomena gap atau teori tidak sejalan dengan fenomena yang ada dimana Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang menurut Adelman dan Morris salah satunya adalah Ketidakmerataan pembangunan antardaerah, (Saripudin 2021) namun pada kenyataannya di beberapa daerah ketimpangan pembangunan naik namun ketimpangan distribusi pendapatan turun, seperti pada provinsi Aceh tahun 2019-2021 ketidakmerataan pembangunan naik yaitu dari 0,384 ke 0,401, tetapi ketimpangan distribusi pendapatan turun dari 0,321 ke 0,319, provinsi Sumatera barat pada tahun 2019-2020 ketidakmerataan pembangunan naik yaitu dari 0,267 ke 0,302.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah ketidakmerataan pembangunan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2021? (2) Seberapa besar kemampuan ketidakmerataan pembangunan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2021 dan tujuan penelitian ini ialah (1) untuk mengetahui pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2021.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

## 2.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal, (Sulistiyono 2021) indikator untuk menjelaskan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan ialah Indeks gini dan kurva Lorenz, (Sriyana. 2021) Nilai indeks Gini berada diantara 0 hingga 1. angka 1 mengindikasikan ketimpangan absolut, dimana hanya 1% pendapatan yang dikuasai oleh penduduk Nilai 0 mengindikasikan kesetaraan penuh, dikarenakan setiap orang mempunyai pendapatan yang sama (Mahri et al. 2021), alat ukur ketimpangan pendapatan lain yaitu kurva lorenz yang menjelaskan distribusi kumulatif pendapatan nasional, (Cendanawangi 2020), dan *atkinson indeks*, *atkinson indeks* merupakan indeks mengukur tingkat kesejahteraan sosial dan distribusi pendapata. (Beik 2019)

Ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh banyak hal seperti perbedaan dalam kesempatan kerja, gaji yang diterima, subsidi, akses pendanaan, pendidikan, kesehatan, informasi, dan teknologi yang didapat, pajak yang harus dibayar, dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, praktik-praktik diskriminasi terkait agama, gender, umur dan lainnya juga akan menimbulkan kesenjangan pendapatan (Tambuna 2018). Sementara itu Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang menurut Adelman dan Morris adalah (Saripudin 2021)

- a. Mobilitas sosial yang rendah
- b. Inflasi,
- c. Pertumbuhan penduduk,
- d. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
- e. Industri kerajinan rakyat yang hancur
- f. Kebijakan industry substitusi impor yang dilaksanakan,
- g. Nilai tukar yang memburuk, dan
- h. Investasi yang lebih banyak di proyek padat modal

## 2.2 Distribusi Pendapatan Dalam Islam

Prinsip distribusi dalam ekonomi islam memiliki yaitu adil dan merata, islam menginginkan distribusi pendapatan yang adil, sehingga distribusi yang adil ialah tujuan pembangunan yang menghendaki komitmen umat islam agar terealisasikan, (Idri 2015) QS: *An-nabl* [16]: 90. Allah SWT berfirman

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*

Prinsip keadilan serta pemerataan pada distribusi juga mengandung maksud bahwa harta yang terpusat di sekelompok orang saja tidak boleh, namun wajib didistribusikan pada semua rakyat, hasil produksi dari kekayaan nasional harus didistribusikan secara adil. (Idri 2015)

Distribusi pendapatan mempunyai pengaruh yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan islam, yaitu kesejahteraan bagi umatnya dunia serta akhirat, hal

tersebut dapat tercapai apabila tercukupi kebutuhan setiap orang sehingga tidak terjadi ketimpangan diantara yang miskin dan yang kaya, konsep tersebut sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yaitu menciptakan kebaikan dengan menghilangkan hal-hal yang merugikan, dan dengan tercukupi kebutuhan tersebut maka akan meminimalisir kejahatan. (Ghofur 2017).

Salah satu kebijakan yang memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan adalah kebijakan fiskal yang menjamin setiap orang mempunyai kesempatan untuk mencapai kesejahteraan (Humairah 2023) terdapat beberapa kebijakan fiskal pada masa Rasulullah yaitu, menjalin silaturahmi untuk meningkatkan permintaan muslim di Madinah sehingga terjadi pertukaran dan distribusi pendapatan, pengumpulan pajak dan kebijakan fiskal khusus. (Mardianto. 2022).

### **2.3 Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah**

Ketidakmerataan pembangunan antar daerah ialah terjadinya disparitas kondisi daerah antara daerah yang maju dengan daerah terbelakang, penyebab disparitas ini timbul yaitu wilayah yang terbelakang kurang bisa meningkatkan potensi wilayah dan sumber daya yang kurang sebagai akibatnya kesenjangan antara wilayah yang maju serta terbelakang semakin jelas. (Nadia et al. 2021) indikator untuk mengukur ketidakmerataan pembangunan antar daerah adalah ketimpangan Williamson, (Huda 2017).

Indeks ketidakmerataan pembangunan ekonomi diberikan dengan 0 hingga 1 atau  $0 < Vw < 1$ . Lebih dekat ke 0 artinya lebih sedikit ketimpangan dan lebih dekat ke 1 berarti lebih banyak ketimpangan. (Sjafrizal 2017) Data ketidakmerataan pembangunan antar daerah diolah penulis menggunakan data yang tersedia di BPS.

Dalam sejarah Islam, zakat diperkenalkan di bawah Khalifah Umar Bin Abdul Aziz sebagai sarana pemerataan pembangunan dan otonomi daerah, dimana setiap daerah berhak mengelola zakat dan pajak secara mandiri dan tidak menuntut upeti kepada pemerintah dan jika terjadi surplus, khalifah menyarankan agar memberikan bantuan kepada daerah miskin agar pembangunan yang adil dapat tercapai. (Qayum 2021)

### **2.4 Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapata**

Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang menurut Adelman dan Morris salah satunya adalah Ketidakmerataan pembangunan antardaerah (Saripudin 2021), Dampak ketidakmerataan dalam pembangunan menimbulkan adanya jurang disparitas antar daerah dan kemudian berdampak pada masalah politik dan social, hal ini jelas merugikan pembangunan, sebagai dampak yang ditimbulkan dapat berupa disparitas antara kelompok miskin dan kaya dimana disparitas ini akan semakin timpang sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. (Azis 2019).

Selain itu arah konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekan dan mengoptimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan GDP daripada meminimalkan kemiskinan serta kesenjangan pendapatan (income disparities) dalam masyarakat sudah

seharusnya dikaji kembali. Hal ini perlu dilihat oleh kita bersama bahwa konsep pembangunan ekonomi kemasyarakatan seharusnya diterapkan dalam perencanaan, strategi, kebijakan serta program kerja pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada menyeimbangkan distribusi pendapatan dalam upaya buat mengatasi kemiskinan. (Urif 2023)

Penelitian oleh Sanjay Kumar Rout & Rajeswari Behera menggunakan model kointegrasi yaitu: FMOLS, DOLS, CCR, DAN ARDL, meneliti dampak jangka panjang dan jangka pendek dari bencana alam, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi, dan sumber daya manusia di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana alam dan pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangan pendapatan jangka panjang dan jangka pendek, pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangan pendapatan disebabkan karena kue pembangunan ekonomi tidak terdistribusi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. (Sanjay Kumar Rout 2022)

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

### 3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif, data berasal dari data sekunder, indikator untuk melihat tingkat ketidakmerataan pembangunan antar daerah adalah indeks wiliamson dan indikator untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan ialah indeks gini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dengan dokumentasi sebagai instrumen penelitian, untuk mengetahui pengaruh linier ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan digunakan Analisis regresi linier sederhana, jawaban rumusan masalah yang pertama diperoleh dengan menggunakan uji t, dan jawaban rumusan masalah yang kedua diperoleh dengan menggunakan uji koefisien determinasi, namun sebelumnya, untuk mengetahui apakah uji regresi layak digunakan dilakukan uji prasyarat data.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bermaksud mengetahui pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2021. Berikut data mengenai ketidakmerataan pembangunan antar daerah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2021.

**Tabel 1**  
**Ketidakmerataan pembangunan antar daerah( Indeks Wiliamson )**

No	Provinsi	2019		2020		2021	
		X	Perkembangan (%)	X	Perkembangan (%)	X	Perkembangan (%)
1	Aceh	0.384	-	0.401	0.043	0.415	0.034
2	Sumatera Utara	0.576	-	0.557	(0.033)	0.556	(0.001)
3	Sumatera Barat	0.267	-	0.302	0.133	1.008	2.337
4	Riau	0.330	-	0.796	1.410	0.418	(0.474)
5	Kep. Riau	0.455	-	0.408	(0.104)	0.398	(0.023)
6	Jambi	0.841	-	0.749	(0.109)	1.053	0.406
7	Sumatera Selatan	0.718	-	0.735	0.024	0.738	0.004
8	Kep. Bangka Belitung	0.214	-	0.200	(0.065)	0.038	(0.809)
9	Bengkulu	0.402	-	0.422	0.049	0.424	0.003
10	Lampung	0.264	-	0.238	(0.099)	0.238	(0.001)
11	DKI Jakarta	0.520	-	0.492	(0.055)	0.484	(0.016)
12	Jawa Barat	0.691	-	0.728	0.054	0.733	0.007
13	Jawa Tengah	0.631	-	0.657	0.040	0.654	(0.004)
14	DI Yogyakarta	0.472	-	0.515	0.093	0.518	0.005
15	Jawa Timur	0.971	-	0.975	0.003	0.982	0.007
16	Banten	0.627	-	0.631	0.005	0.964	0.528
17	Bali	0.953	-	0.365	(0.617)	0.350	(0.042)
18	Kalimantan Barat	0.269	-	0.276	0.027	0.279	0.010
19	Kalimantan Tengah	0.189	-	0.216	0.144	0.218	0.010
20	Kalimantan Selatan	0.435	-	0.434	(0.002)	0.434	(0.001)
21	Kalimantan Timur	0.480	-	0.463	(0.036)	0.453	(0.021)
22	Kalimantan Utara	0.147	-	0.171	0.165	0.169	(0.014)
23	Sulawesi Utara	0.500	-	0.486	(0.028)	0.496	0.021
24	Sulawesi Tengah	1.001	-	1.110	0.110	1.522	0.370
25	Sulawesi Selatan	0.625	-	0.772	0.237	0.681	(0.118)
26	Sulawesi Barat	0.342	-	0.331	(0.035)	0.333	0.007
27	Sulawesi Tenggara	0.443	-	0.488	0.101	0.487	(0.001)
28	Nusa Tenggara Barat	0.570	-	0.719	0.261	0.705	(0.019)
29	Nusa Tenggara Timur	0.666	-	0.635	(0.046)	0.623	(0.019)
30	Gorontalo	0.531	-	0.191	(0.639)	0.194	0.012
31	Maluku	0.243	-	0.434	0.787	0.443	0.022
32	Maluku Utara	0.281	-	0.357	0.271	0.690	0.934
33	Papua Barat	1.464	-	1.491	0.018	1.447	(0.029)
34	Papua	1.176	-	1.486	0.264	1.837	0.236

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang paling tinggi terjadi di papua yaitu sebesar 1.837 dan tingkat ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang paling rendah terjadi di kepulauan Bangka Belitung sebesar 0.038. Namun apa yang terjadi pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atas kegiatan ekonomi yang digambarkan dalam data di atas? berikut data mengenai ketimpangan distribusi pendapatan Di Indonesia

**Tabel 2**  
**Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia (Indeks Gini)**

No	Provinsi	2019		2020		2021	
		Y	Perkembangan (%)	Y	Perkembangan (%)	Y	Perkembangan (%)
1	Aceh	0.321	-	0.319	(0.002)	0.323	0.004
2	Sumatera utara	0.315	-	0.314	(0.001)	0.313	(0.001)
3	Sumatera barat	0.307	-	0.301	(0.006)	0.3	(0.001)
4	Riau	0.331	-	0.321	(0.010)	0.327	0.006
5	Jambi	0.324	-	0.316	(0.008)	0.315	(0.001)
6	Sumatera selatan	0.339	-	0.338	(0.001)	0.34	0.002
7	Bengkulu	0.329	-	0.323	(0.006)	0.321	(0.002)
8	Lampung	0.331	-	0.32	(0.011)	0.314	(0.006)
9	Kep.Bangka Belitung	0.262	-	0.257	(0.005)	0.247	(0.010)
10	Kep. Riau	0.337	-	0.334	(0.003)	0.339	0.005
11	Dki Jakarta	0.391	-	0.4	0.009	0.411	0.011
12	Jawa barat	0.398	-	0.398	0.000	0.406	0.008
13	Jawa tengah	0.358	-	0.359	0.001	0.368	0.009
14	Di Yogyakarta	0.428	-	0.437	0.009	0.436	(0.001)
15	Jawa timur	0.364	-	0.364	0.000	0.364	0.000
16	Banten	0.361	-	0.365	0.004	0.363	(0.002)
17	Bali	0.37	-	0.369	(0.001)	0.375	0.006
18	Nusa tenggara barat	0.374	-	0.386	0.012	0.384	(0.002)
19	Nusa tenggara timur	0.355	-	0.356	0.001	0.339	(0.017)
20	Kalimantan barat	0.318	-	0.325	0.007	0.315	(0.010)
21	Kalimantan tengah	0.335	-	0.32	(0.015)	0.32	0.000
22	Kalimantan selatan	0.334	-	0.351	0.017	0.325	(0.026)
23	Kalimantan timur	0.335	-	0.335	0.000	0.331	(0.004)
24	Kalimantan utara	0.292	-	0.3	0.008	0.285	(0.015)
25	Sulawesi utara	0.376	-	0.368	(0.008)	0.359	(0.009)
26	Sulawesi tengah	0.33	-	0.321	(0.009)	0.326	0.005
27	Sulawesi selatan	0.391	-	0.382	(0.009)	0.377	(0.005)



28	Sulawesi tenggara	0.393	-	0.388	(0.005)	0.394	0.006
29	Gorontalo	0.41	-	0.406	(0.004)	0.409	0.003
30	Sulawesi barat	0.365	-	0.356	(0.009)	0.366	0.010
31	Maluku	0.32	-	0.326	0.006	0.316	(0.010)
32	Maluku utara	0.31	-	0.29	(0.020)	0.278	(0.012)
33	Papua barat	0.381	-	0.376	(0.005)	0.374	(0.002)
34	Papua	0.391	-	0.395	0.004	0.396	0.001

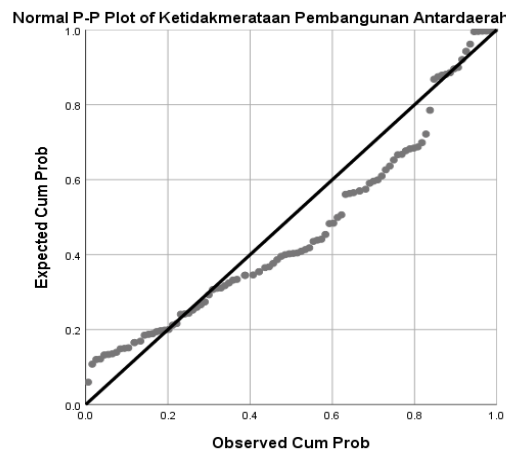
*Sumber: Data Sekunder, 2022*

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang paling tinggi terjadi di provinsi DI Yogyakarta sebesar 0.437 dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang paling rendah terjadi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0.247.

Sebelum uji hipotesis statistik, sebelumnya dilakukan uji prasyarat data untuk mengetahui apakah uji regresi dapat digunakan, dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas.

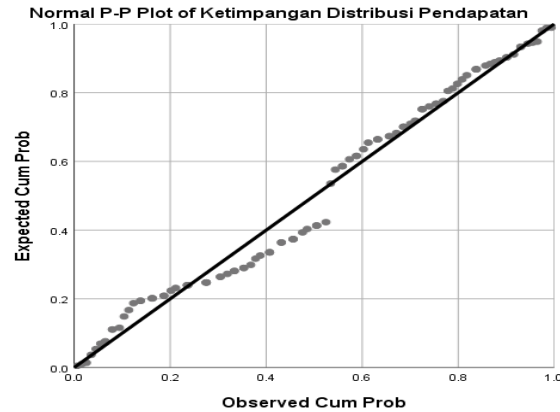
Penggunaan uji normalitas dengan metode uji Normal Probability Plot (NPP) bertujuan mengetahui apakah data berasal dari populasi yang normal.

**Gambar 2**  
**Grafik Normal Probability Plot Ketidakmerataan Pembangunan Antar daerah**



*Sumber : Data Sekunder, 2023*

**Gambar 3**  
**Grafik Normal Probability Plot Ketimpangan Distribusi Pendapatan**



Sumber : Data Sekunder, 2023

Hasil penelitian uji normalitas menggunakan *Normal P-P Plot* pada variabel Ketidakterataan pembangunan antar daerah yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal dikarenakan titik-titik di gambar terlihat mengarah garis diagonal serta persebaran titik-titik data mengikuti garis diagonal dan uji normalitas menggunakan *Normal P-P Plot* pada variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal dikarenakan titik-titik di gambar terlihat mengarah garis diagonal serta persebaran titik-titik data mengikuti garis diagonal.

**Tabel 3**  
**Uji Homogenitas**  
**Test of Homogeneity of Variances**

		Levene	df		
		Statistic	1	df2	Sig.
Ketidakterataan_Pembangunan_Antar_Daerah	Based on Mean	1.017	2	201	.364
	Based on Median	.395	2	201	.675
	Based on Median and with adjusted df	.395	2	193.457	.675
	Based on trimmed mean	.736	2	201	.480

Sumber : Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji homogenitas yang dilakukan nilai homogenitas diperoleh signifikan sebesar 0,364, yang mana hasil ini besar sama dari taraf signifikan 0,05 atau nilai sig  $0,364 \geq 0,05$  jadi kesimpulannya data memiliki varians yang sama.

**Tabel 4**  
**Uji Linearitas**  
**ANOVA Table**

			Sum of		Mean		
			Squares	df	Square	F	Sig.
Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan *	Between	(Combined)	.150	96	.002	2.668	.135
		Linearity	.007	1	.007	11.87	.018
Ketidakterataan_Pembangunan	Within	Groups				1	

bangunan_Antar_Daerah	Deviation from Linearity	.143	95	.002	2.572	.145
	Within Groups	.003	5	.001		
	Total	.153	101			

Sumber : Data Sekunder, 2023

Hasil uji linearitas didapat sebesar 0,145 dimana dilihat nilai signifikansi *Deviation from Linearity* antara variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah dan ketimpangan distribusi pendapatan angka 0,145 lebih dari 0,05 atau  $0,145 > 0,05$ , dari hasil uji linearitas ini kesimpulan yang dapat diambil yaitu variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah mempunyai hubungan linear dengan variabel ketimpangan distribusi pendapatan.

**Tabel 5**  
**Uji Regresi Linear Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.333	.007		44.705	.000
Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar_Daerah	.024	.011	.213	2.182	.031

a. Dependent Variable: Ketimpangan\_Distribusi Pendapatan

Sumber : Data Sekunder, 2023

Berdasarkan analisis regresi sederhana, maka persamaan regresi yang digunakan untuk memperkirakan variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y) jika variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah (X) diketahui adalah:

$$Y = 0,333 + 0,0024 X + e_i$$

Persamaan tersebut menyatakan bahwa Konstanta sebesar 0.333, yang artinya apabila variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah (X) adalah nol, maka variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y) adalah 0,333, Koefisien regresi ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebesar 0,0024 artinya ketimpangan distribusi pendapatan naik sebesar 0,0024 indeks gini jika ketidakmerataan pembangunan antar daerah naik sebesar satu satuan maka.

Adapun untuk melihat apakah terdapat pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan disttibusi pendapatan digunakan uji t,

**Tabel 6**  
**Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.333	.007		44.705	.000
Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar_Daerah	.024	.011	.213	2.182	.031

a. Dependent Variable: Ketimpangan\_Distribusi Pendapatan

Sumber : Data Sekunder, 2023

Dari tabel tersebut, didapat nilai sig 0,031, sehingga  $0,031 < 0,05$  berarti secara parsial variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah berpengaruh pada alpha 5% atau confidence interval 95% terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Maka keputusan yang di ambil terdapat pengaruh yang signifikan ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia dikarenakan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Untuk mengetahui apakah ketidakmerataan pembangunan antar daerah berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan maka digunakan uji koefisien determinasi.

**Tabel 7**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.221 <sup>a</sup>	.045	.039	.038116	1.527

a. Predictors: (Constant), Ketidakmerataan\_Pembangunan\_Antar daerah

b. Dependent Variable: Ketimpangan\_Distribusi\_Pendapatan

Sumber : Data Sekunder, 2023

Nilai R-squared sebesar 0,045, atau 4,5%, diperoleh dengan menggunakan uji koefisien determinasi, jadi kemampuan variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah menjelaskan naik turunnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah 4,5% dan sisanya disebabkan oleh variabel di luar penelitian yaitu: investasi pada proyek padat modal, nilai tukar yang memburuk, kebijakan industri substitusi impor, industri-industri kerajinan rakyat yang hancur Inflasi, mobilitas sosial yang rendahnya dan pertumbuhan penduduk sebesar 95,5%.

Temuan persamaan regresi penelitian ini,  $Y = 0,333 + 0,0024 X + e_i$ , Konstanta sebesar 0.333 yang artinya apabila variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah (X) adalah nol, maka variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y) adalah sebesar 0,333 indeks, 2)

Koefisien regresi ketidakmerataan pembangunan sebesar 0,024 artinya jika ketidakmerataan pembangunan antar daerah mengalami peningkatan satu satuan maka ketimpangan disttibusi pendapatan meningkat sebesar 0,024 indeks.

Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Adelman dan Morris dimana ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang dapat dipengaruhi oleh ketidakmerataan pembangunan antar daerah (Saripudin 2021), dampak ketidakmerataan dalam pembangunan menimbulkan adanya jurang disparitas antar daerah dan kemudian berdampak pada masalah politik dan social, hal ini jelas merugikan pembangunan, sebagai dampak yang ditimbulkan dapat berupa disparitas antara kelompok miskin dan kaya dimana disparitas ini akan semakin timpang sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. (Azis 2019).

Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu oleh Sanjay Kumar Rout dan Rajeswari Behera (2022) dengan judul *Income Inequality and its Important Determinants in India*. Menggunakan model kointegrasi yaitu: FMOLS, DOLS, CCR, DAN ARDL, meneliti dampak jangka panjang dan jangka pendek dari bencana alam, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi, dan sumber daya manusia di india. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana alam dan pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangan pendapatan jangka panjang dan jangka pendek, pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangan pendapatan disebabkan karena kue pembangunan ekonomi tidak terdistribusi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. (Sanjay Kumar Rout 2022)

Pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2021 tergolong rendah namun pemerintah perlu mengatasi tingginya ketidakmerataan pembangunan antar daerah sehingga ketimpangan distribusi pendapatan dapat berkurang melalui kebijakan kemudian masih ada variabel lain yang lebih mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tidak semakin naik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian uji t Dari tabel tersebut, didapat nilai sig 0,031, sehingga  $0,031 < 0,05$  berarti secara parsial variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah berpengaruh pada alpha 5% atau confidence interval 95% terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Maka keputusan yang di ambil terdapat pengaruh yang signifikan ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia dikarenakan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak

Nilai R-squared sebesar 0,045, atau 4,5%, diperoleh dengan menggunakan uji koefisien determinasi, jadi kemampuan variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah menjelaskan naik turunnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah 4,5% dan sisanya disebabkan oleh variabel di luar penelitian yaitu: investasi pada proyek padat modal, nilai tukar yang memburuk, kebijakan industri substitusi impor, industri-industri kerajinan rakyat yang hancur Inflasi, mobilitas sosial yang rendahnya dan pertumbuhan penduduk sebesar 95,5%.

### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan jadi hal-hal yang dapat dilakukan:

1. Berdasarkan penelitian Uji t yang dilakukan diketahui bahwasanya ketidakmerataan pembangunan antar daerah memiliki pengaruh dalam menjelaskan naik turunnya ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia maka dalam hal ini

- pemerintah perlu untuk lebih memperhatikan solusi ketimpangan distribusi pendapatan yang diakibatkan oleh ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang meningkat sehingga diperlukannya kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain.
2. Koefisien determinasi memperoleh nilai sebesar sebesar 4,5% hal ini tergolong rendah namun pemerintah perlu mengatasi tingginya ketidakmerataan pembangunan antar daerah sehingga ketimpangan distribusi pendapatan dapat berkurang melalui kebijakan yang diberikan, kemudian masih ada variabel lain yang lebih mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tidak semakin tinggi.

## DAFTAR REFERENSI

- Arsyad, L. 2014. *Ekonomi Pembangunan Lanjutan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Azis, Muhammad Hasan dan muhammad. 2019. *Pembangunan Ekonomi*. Makassar: Pustaka Taman Ilmu.
- Beik, Irfan Syauki. 2019. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Cendanawangi, Eunike. 2020. “Pengaruh Remitansi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1987-2017.” *CALYPTRA V* Vol.8 (2).
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigm, Pengembangann Ekonomi Syariah*. Depok: RajaGrafindo persada.
- Hamrullah, Kurniati Mansyur. Nursini. 2021. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.” *Development Policy and Management Review* 1 (2): 79–107.
- Hidayati, Ns. n.d. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Sukaharjo: Pradina pustaka.
- Huda, Nurul. 2017. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Humairah, F. 2023. “Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi.” *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1–13. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/2519%0Ahttps://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/download/2519/1292>.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Mahri, Jajang W, Cupian M Nur, Rianto Al, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhamad Fajri, and Aas Nurasyiah. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.
- Makapedua, Jacob, Christien Karambuti, and Cysca Langi. 2023. “Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan ( Beberapa Kajian.” *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* 11 (1): 158–62.
- Mardianto., Dedi. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Indonesia: Sada Kurnia Pustaka.
- Nadia, Alfi, Irwan Safwadi, Idal Bahri, and Yuliana. 2021. “Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antarkota Di Provinsi Aceh Tahun 2008-2017.” *Prosiding SEMDI-UNAYA* 4 (1): 304–14. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/semdiunaya>.
- Purba, Bonaraja. 2021. . . *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Qayum, Abdul. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. jakarta: Departemen ekonomi dan keuangan

syariah.

- Sanjay Kumar Rout, Rajeswari Behera. 2022. "Income Inequality and Its Important Determinants in India." *Saudi Journal of Economics and Finance* 9414: 171–87. <https://doi.org/10.36348/sjef.2022.v06i05.002>.
- Sariipudin, Udin. 2021. *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf*. Bandung: Whidina Bhakti Persada Bandung.
- Sjafrizal. 2017. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sriyana. 2021. *Kemiskinan, Pemberdayaan, Dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Sulistyono, Yery Arif Ramadhan. Setyo Wahyu. 2021. "Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Karesidenan Malang Tahun 2015-2019." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 5 (4): 763–72.
- Tambuna, Tulus T.H. 2018. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Rajagrafindo Persada.
- Urif, U Z. 2023. "Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Maqashid* 1 (1): 27–36. <https://jurnal.iaihnwlotim.ac.id/index.php/maqashid/article/view/23%0Ahttps://jurnal.iaihnwlotim.ac.id/index.php/maqashid/article/download/23/8>.
- Yuliadi, Najwa Farrah. Imamudin. 2020. "Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 2011-2019" 2020. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80749/Determinan-Ketimpangan-Distribusi-Pendapatan-di-Indonesia-Periode-Tahun-2011-2019>.